

**DISTORSI PESAN DALAM KOMUNIKASI ORGANISASI
KAJIAN TEORITIS TERHADAP KESALAHAN KETIK PENETAPAN KETUA KPU RI SEBAGAI
TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

*MESSAGE DISTORTION ON COMMUNICATION OF ORGANIZATION
(THEORETICAL STUDY FROM TYPO DETERMINATION OF GENERAL ELECTION CHAIRMAN OF REPUBLIK
INDONESIA AS SUSPECT BY POLICE OF REPUBLIK INDONESIA)*

Bachruddin Ali Akhmad

Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
bachruddin.01@gmail.com

ABSTRACT

“Typo” as the reason that have been proposed by the police of republic Indonesia to abrogate the suspect status of chairman of the election commission (KPU) to witness reported, could not be accepted by some members of the citizens. However in depth research the judge from the citizens are have much biases. Otherwise, legally formal, the reason of the abrogate has been confirmed, both from substantive or in terms of the law. because the act of “typo” is very possible to be studied scientifically in this case using the concept of message distortion, it can be concluded that there are five factors to be the cause.

Keywords: *Community Response Infotainmenton Television*

ABSTRAK

“Salah ketik” sebagai alasan yang dikemukakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk penghapusan status tersangka Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi saksi terlapor, tidak bisa diterima oleh sebagian warga masyarakat. Namun penilaian penilaian warga masyarakat bila diteliti lebih dalam tidak terlepas dari bias bias. Sebaliknya, secara legal formal, alasan penghapusan tersebut telah sah baik secara substantif maupun dari segi hukumnya. Karena tindakan “salah ketik” sangat dimungkinkan untuk dikaji secara ilmiah dalam hal ini menggunakan konsep distorsi pesan, maka dapat disimpulkan ada 5 faktor yang menjadi penyebabnya.

Kata Kunci: *Konsep Distorsi Pesan, Salah Ketik*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Representasi (perwakilan) negara dimanapun, harus dijaga kehormatannya. Hal itu sangat penting, agar negara dan aparturnya punya rasa percaya diri (self confident) yang tinggi dan dipatuhi (effective dan efficient) dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Jika representasi negara dikatakan ‘lemah’ (misal, tidak membalas ketika dipermalukan) dan hujatan semacam itu dilontarkan secara terbuka (di media massa dan atau dimedia sosial) bahkan dengan bahasa yang tajam dan memojokan. Maka penegasan (perkataan atau perbuatan yang bisa menimbulkan citra yang buruk) representasi negara yang dilakukan (secara terus menerus) pada gilirannya akan menimbulkan reaksi (pembelaan diri dan atau serangan balik) dari lembaga negara (yang menjadi obyek) dan aparturnya.

Bila ditelaah dimedia sosial sejak bulan juli 2010 sampai dengan oktober 2011 (<http://news.okezone.com>) terjadi serangkaian pemberitaan penegasan terhadap representasi negara (seperti lembaga Kepresidenan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia) yang dapat menurunkan reputasi (nama baik) representasi lembaga tinggi negara tersebut.

Diawal September 2010 Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyoroti penangkapan dan penganiayaan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia diperairan Bintang yang masih termasuk wilayah RI. Namun, Presiden SBY memberikan sorotan dengan pernyataan yang dianggap lunak (antara lain Presiden mengatakan: ‘Hindari kekerasan dalam aksi protes Malaysia’). Antara lain karena pernyataan ini menimbulkan reaksi yang menyayangkan dari berbagai pihak. Misalnya, mantan Panglima Abri di era Presiden Soeharto mendorong agar pemerintah harus keras kepada Malaysia. Begitu juga Ketua PBNU meminta Presiden SBY berani melawan

Malaysia. Dan dari berbagai pihak meminta walaupun berunding harus bersikap tegas terkait waktu dan keputusannya kalau perlu didukung dengan kekuatan senjata.

Lembaga Kejaksaan Agung juga dinegatifkan (terlepas benar tidaknya suatu tuduhan) oleh pernyataan mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan jabatan Hendarman Supanji sebagai Jaksa Agung merupakan illegal, didukung oleh Dosen hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) Margarito (“Jabatan Hendarman illegal’ tegasnya).

Bahkan Yusril mematahkan sanggahan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, bahwa jabatan Jaksa Agung sah berdasarkan Undang Undang Kementerian Negara yang disahkan tanggal 6 November 2008 yang mulai berlaku dua tahun kemudian. Menurut Yusril sejak diangkat sebagai Jaksa Agung dengan Keppres nomor 31 P tahun 2007 yang masa baktinya berakhir 20 oktober 2009. Sejak berakhir masa jabatannya itu Hendarman tidak pernah diangkat lagi sebagai Jaksa Agung sampai sekarang (Juli 2010). ‘Jadi, kalau Pak Sudi katakan sah, dia harusnya mampu menunjukan kepada publik mana keppres pengangkatan Hendarman kembali sebagai Jaksa Agung, dan juga buktikan kapan dia pernah angkat sumpah sebagai Jaksa Agung untuk priode berikutnya’.

Polemik tentang legalitas Jaksa Agung ini, akhirnya dimenangkan oleh Yusril dengan turunya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan jabatan Jaksa Agung yang sekarang tidak sah, sejak pukul 14.35 tanggal 22 September 2010. Keputusan MK ini tentunya tambah memperlemah reputasi lembaga negara ini.

Lembaga negara strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia pun, tidak luput dari penegasan. Majalah Tempo edisi 28 Juni 2010 mengungkapkan adanya sejumlah perwira tinggi Polri memiliki rekening fantastis. Sebut saja JMS yang memiliki dana Rp 2.088.000.000. Kemudian SYW memiliki dana Rp 10.007.939.259. dan BG diduga memiliki dana lebih dari Rp 1.1 milyar dan sejumlah perwira tinggi lainnya.

Menanggapi hal itu Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri minta bawahannya yang berpangkat Komisariss Besar (perwira menengah) tidak diperbolehkan membocorkan data apapun dan membuka rahasia. Reaksi Polri berikutnya adalah akan melakukan gugatan terhadap majalah Tempo yang mempublikasikan rekening gendut para pati polri tersebut.

Reaksi tersebut justru semakin membuat banyak kalangan menjadi penasaran. Sehingga wakil ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Priyo Budi Santoso meminta agar Polri terbuka dengan persoalan tersebut. Polri seharusnya tidak bersikap reaktif, melainkan seharusnya membuktikan (“bahwa polri mau resiko resiko”). Polri tidak mengikuti saran tersebut, malahan Mabes Polri mengeluarkan pernyataan resmi bahwa 17 rekening gendut milik Pati Polri tersebut masih wajar. Sikap ini tidak menolong mengurangi citra penegasan dari adanya pemberitaan ‘ rekening gendut’ tersebut.

Bahkan pemberitaan tentang penggerebekan oleh Densus 88 terhadap teroris di Cakung tidak mampu mengalihkan isu ‘rekening gendut’. Belakangan justru Polri (Densus 88) dituding kerap melanggar HAM dalam penangkapan jaringan teroris.

Reputasi Polri semakin menurun ketika dalam kasus dugaan pemalsuan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) terkait calon legislatif Dapil Sulsel I dari partai Hanura Dewi Yasin Limpo, dengan tersangkanya Mashuri Hasan. Keputusan MK tersebut menambah perolehan suara Dewi, sehingga membawanya terpilih menjadi anggota DPRRI. Namun, belakangan diketahui surat Keputusan MK tersebut palsu dan pemalsuan itu diduga melibatkan mantan Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Andi Nurpati sebagai aktor Intelektualnya; yang kemudian menjadi petinggi di DPP Partai Demokrat yang merupakan partai penguasa. Namun, ketika kasus ini mengarah kepada Andi Nurpati, polisi terkesan menunda nunda penetapannya sebagai tersangka. Terkesan Polri sepertinya mengalami tekanan untuk tidak melakukan hal itu.

Diduga salahsatu usaha Polri untuk mengalihkan kasus Andi, adalah dengan penetapan Ketua KPU RI sebagai tersangka dalam sengketa pemilu legislatif tahun 1999 di Halmahera barat.

Permasalahan

Andaikata Wakil Jaksa Agung Darmono,SH tidak mengungkapkan kepada Wartawan tentang status Ketua KPU sebagai *tersangka* yang intinya dikenakan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan pasal 266 KUHP tentang memasukan keterangan palsu dalam akta otentik saat pemilu legislatif tahun 2009 untuk daerah pemilihan Halmahera barat, penetapan yang sudah diputuskan Kepolisian Indonesia sejak 27 Juli 2011 tidak berubah menjadi *saksi terlapor*.

Sungguh luar biasa dua status yang jauh sangat berbeda *konsekwensi* hukumnya itu berubah hanya

dalam satu hari setelah diumumkan keruang publik – diungkapkan Darmono 10 Oktober sebagai tersangka dan diubah secara lisan oleh Kepolisian Indonesia besoknya tanggal 11 Oktober 2011 sebagai saksi terlapor. Akselerasi kedua peristiwa yang sangat cepat itu tak pelak lagi menimbulkan tanda-tanya besar bagi banyak orang.

Diantara mereka ada yang berusaha menjawab mengapa bisa muncul solusi ‘salah ketik’ untuk sebagai alasan untuk mengubah status hukum Ketua KPU diatas. Ada yang berpendapat, hal itu menunjukkan bahwa sebagai institusi Polri kurang profesional. Yang lain berpendapat, terjadinya kasus ‘salah ketik’ merupakan dampak dari overlappingnya wewenang didalam penegakan hukum di Indonesia.

Dugaan adanya penyumbatan informasi (Information Result) sempat juga mencuat, mengingat jika terjadi penetapan Ketua KPU sebagai tersangka, bukan tidak mungkin dia (akan) membuka kartu dalam kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu legislatif tahun 2009 di Sulawesi Selatan yang diduga melibatkan mantan anggota KPU Andi Nurpati. Selain itu Kredibilitas Lembaga KPU juga akan menurun yang bisa berujung kepada munculnya penilaian bahwa proses demokrasi melalui pemilu dipandang miring oleh masyarakat, termasuk hasil pemilu presiden.

Bila kita mencoba untuk melihat persoalan ‘salah ketik’ lebih masuk kedalam organisasi Kepolisian yang besar dan memiliki sarana yang canggih, logika yang coba dikembangkan tampaknya kurang memiliki ruang. Dalam organisasi Kepolisian juga dikenal adanya SOP (Standar Operasional), yang dalam kasus ‘salah ketik’ tentunya tidak lazim.

Ketidak-laziman ini sangat layak untuk diangkat dalam kajian ini, *untuk dianalisis secara teoritis*, dengan merumuskan sebuah rumusan masalah: Apakah faktor penyebab ‘salah ketik’ dilihat dari konsep distorsi pesan ?

METODE PENELITIAN

‘Salah ketik’ dua kata yang cukup pendek, jika dikaitkan dengan aktivitas didalam organisasi yang besar dan diungkapkan dalam akselerasi yang sangat cepat dan menyangkut status hukum seorang Pimpinan lembaga setingkat Departemen, tentu tidak bisa dianggap persoalan sederhana.

Jika tindakan ‘salah ketik’ ini dikaitkan dengan aktivitas komunikasi organisasi, maka penyebabnya bisa dikaitkan dengan konsep distorsi pesan (informasi). Pengertian ini bisa dijelaskan dengan mengkontraskannya dengan pengertian

ketepatan pesan, yang menunjuk kepada kemampuan orang untuk mereproduksi atau menciptakan suatu pesan dengan tepat. Dalam komunikasi, istilah ketepatan digunakan untuk menguraikan tingkat persesuaian diantara pesan yang diciptakan oleh pengirim dan reproduksi sipenerima mengenai pesan tersebut. Atau dengan kata lain tingkat persesuaian arti pesan yang dimaksudkan oleh sipengirim dengan arti yang diinterpretasi oleh si penerima. Kekurangan ketepatan atau perbedaan arti diantara yang dimaksudkan oleh si pengirim dengan interpretasi si penerima dinamakan distorsi. Perbedaan arti atau distorsi pesan dapat merupakan hal yang kritis dalam organisasi. Misalnya salah menginterpretasikan instruksi pemakaian suatu mesin dapat menimbulkan kerusakan yang fatal bagi mesin itu (Muhammad, Arni, 1995:206)

Distorsi pesan (informasi) terdiri dari dua, yakni systematic distortion dan random distortion. Systematic distortion biasanya terjadi melalui pembiasan informasi yang disengaja. Sementara itu, random distortion terjadi melalui kecerobohan atau ketidak tahuan. Distorsi yang disengaja misalnya pemutar balikan fakta (distortion of the facts). Distorsi ini sengaja dibuat agar audience mengikuti konstruksi informasi yang diciptakan media massa. Misalnya, di zaman perang Dunia I bangsa barat menggembar gemborkan informasi bahwa lebih dari 6 juta orang Yahudi terbunuh oleh Nazi Hitler. Informasi ini sebenarnya tidak lebih dari pemutar balikan fakta agar Hitler di cap sebagai satu-satunya penjahat perang. Sampai sekarang informasi itu terus digembar gemborkan. Padahal menurut Roger Geraudy (2000), mitos tentang kekejaman Nazi itu sengaja diciptakan dan dibesar-besarkan untuk mengabsahkan perilaku zioisme Israel. Tujuannya adalah agar warga yahudi dipersepsikan sebagai bangsa tertindas dan warga dunia memaklumi atas perilaku Israel.

Sementara itu, distorsi yang tidak disengaja terjadi karena kecerobohan atau ketidak tahuan. Hal ini terkait dengan human error (kesalahan manusia). Kecerobohan mungkin terjadi karena kekurangan informasi, tergesa-gesa untuk target siaran atau terbit. Kemungkinan informasi hanya dikutip dari media lain, sementara media lain belum terjamin kevalidan datanya. Apa yang dialami Jawa pos (6 mei 2000) dengan memberitakan kasus suap yang melibatkan tokoh NU (KH Hasyim Muzadi) merupakan contoh konkret. Dalam “liputan 6 siang” tanggal 7 mei 2000 diberitakan tentang pendudukan warga NU pada kantor Jawa Pos pada tanggal 7 mei 2000. Pendudukan itu terkait dengan isu suap yang melibatkan tokoh NU tersebut. Atas pendudukan itu,

Jawa Pos mengatakan bahwa berita tersebut di kutip dari majalah Tempo. Padahal, Tempo sendiri sudah meralatnya. Terlepas dari siapa yang salah, ada kecerobohan seperti yang dilakukan Jawa Pos. Pencantuman nama tersebut sebenarnya merupakan kesalahan infografis. Infografis tersebut digunakan untuk mengutip Tempo edisi 1 – 7 mei 2000. Ternyata ada kesalahan ketik maksudnya Hasyim Wahid terketik Hasyim Muzadi. (Nuruddin, 2007: 126-127).

Peristiwa ‘salah ketik’ terjadi dalam ranah organisasi, dan ‘salah ketik’ dapat dilihat sebagai produk dari serangkaian aktivitas komunikasi. Karena itu peristiwa ‘salah ketik’ ini dapat didekati dengan pendekatan dan teori- teori komunikasi organisasi.

Goldhaber (1993: hal 33) dalam bukunya ‘organization Communication’ membagi teori-teori dan pemikiran organisasi kedalam 3(tiga) aliran besar.

Aliran pertama adalah teori-teori ilmiah klasik (classical school) yang merupakan perspektif paling awal yang menyentuh kompleksitas organisasi modern, dimulai sekitar tahun 1900 an. Beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dari teori ilmiah klasik antara lain: Bagaimana pekerjaan dibagi? Bagaimana tenaga kerja dibagi-bagi? Seberapa banyak tingkatan kewenangan dan kontrol? Berapa banyak orang yang seharusnya ada disetiap tingkatan kewenangan? Apa spesifikasi setiap pekerjaan?

Aliran kedua adalah teori-teori hubungan manusia (human relations school) termasuk didalamnya teori yang dianggap transisional dan perkembangan sumber daya manusia. Teori transisional dipicu dengan munculnya pertimbangan akan perilaku manusia pada organisasi. Namun, teori ini tidak mengubah sepenuhnya pengertian teori-teori ilmiah klasik melainkan hanya menambahkan perspektif saja. Sedangkan teori perkembangan sumber daya manusia adalah hasil dari munculnya konsep-konsep baru memahami prinsip-prinsip motivasi kebutuhan manusia terhadap pemenuhan diri (self-fulfilment).

Teori-teori ini tidak hanya membahas karakteristik organisasi namun juga mengangkat isu mengenai efektivitas organisasi dan kontrol

manajerial. Teori-teori ini dilihat sebagai resep pengaturan (prescriptions for control). Beberapa pertanyaan yang diangkat dalam teori ini antara lain: peranan apa yang dimiliki setiap orang dalam organisasi? Apa Status hubungan antar individu dalam organisasi? Apa saja kebutuhan sosial dan psikologis yang dimiliki mereka? Kelompok-kelompok informal apa saja apa saja yang ada dalam organisasi?

Aliran ketiga adalah teori-teori yang berhubungan dengan system sosial (Social system school) dan menitik beratkan hubungan dari bagian-bagian yang ada didalam organisasi.

Berbeda dengan pengelompokan diatas Putnam (dalam Putnam & Pacanowski, 1983 : 33) mengemukakan 4(empat) pendekatan atau paradigma dalam mempelajari organisasi. Keempat pendekatan tersebut adalah: fungsional, interpretif, humanis radikal dan strukturalis radikal

Menurut Pace & Faules (1994:53) teori- teori tentang organisasi ibarat sebuah garis kontinum yang terus bergeser kearah subyektivisme. Kecenderungan ini merupakan perkembangan bahkan dianggap sebagai perubahan paradigma dalam melihat organisasi yang semula sangat positivistik dan diwakili pendekatan fungsionalisme. Dewasa ini, pendekatan lainnya, terutama pendekatan interpretif yang sering dipertentangkan dengan pendekatan fungsionalis, yang memberikan lebih banyak perhatian dan memberikan ruang bagi perkembangan teori-teori yang samasekali berbeda dengan teori klasik tentang organisasi. Berbeda dengan pendekatan fungsionalis, pendekatan interpretif memandang organisasi sebagai konstruksi sosial terhadap realitas. Dengan pendekatan ini, dilakukan pengorganisasian (organizing) yang merupakan proses komunikasi (communicating) (Putnam, dalam Putnam dan Pacanowski, 1995: 53). Komunikasi yang dalam kacamata fungsionalis hanya merupakan salah satu aktivitas organisasi berdasarkan perspektif interpretative menjadi proses yang membentuk struktur sosial secara terus menerus dalam konteks organisasi (Hawes, 1974 dalam Putnam & Pacanowsky, 1983: 53)

Tabel 1 Komparasi Teori

Pace & Faules (1994)	Teori Transisi		Teori Kontemporer
	Teori Behaviour	Komunikasi otoritas – Chester Barnard	
Human Relations-Elton Mayo			
Fusi-Bakke & Argyris		Teori Kultural	
Lingking Pin - Likert			
Sistem Sosial Katz & Kahn			
Ad - hocracy			
Teori Sistem	Buck Rogers		
	Teori Metafora biologi		Teori Kontemporer
	Teori sistem		Self-managed team & Concertive control
Daniels, Spiker, Papa (1997)	Teori Reduksi Ekuivokalis		Workplace Democracy
	Psikologi Evolusioner		Teori Feminis
	Sosiobiologi		Konsep Emansipasi

Sementara Pace & Faules (1994) membagi teori Pasca klasik menjadi dua kelompok besar, yaitu teori transisi dan teori Kontemporer. Sedangkan Daniel, Spike dan Papa (1997 : vii-viii) menyebutkan kedua kategori ini sebagai Teori metafora biologi dan teori kontemporer. Sebagai gambaran, berikut perbandingan pengelompokan teori pasca klasik atau teori dengan pendekatan interpretif ini berdasarkan kedua referensi tersebut. Dapat dilihat pada Tabel 1, dalam pengelompokan Pace & Faules (1994), teori Weick termasuk teori kontemporer, namun pada pengelompokan Daniel Spiker dan Papa (1997) dikelompokkan pada teori reduksi ekuivokalis.

Dilihat dari substansi perspektif yang ada sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka diantara perspektif awal yang memperhitungkan faktor manusia dan komunikasi dalam tindakan organisasi adalah perspektif human relations dan system sosial. Sedangkan yang memposisikan komunikasi sebagai faktor sentral dalam organisasi diantaranya adalah Perspektif transisi dan Teori metapora biologi. Salah satu teori yang termasuk dalam perspektif Human relations adalah teori transisional sebagaimana yang dikemukakan oleh Chester Barnard. Melalui bukunya yang terbit ditahun 1938 yang berjudul 'The Function of the Executive' dia menilai teori-teori klasik mengenai organisasi tidak menjawab permasalahan karena menganggap organisasi hanya sebagai struktur yang dapat direkayasa secara mekanis agar jelas dan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Barnard eksistensi suatu organisasi (sebagai suatu system kerjasama) bergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan untuk bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Maka ia menyimpulkan bahwa ' fungsi pertama seorang eksekutif adalah

mengembangkan dan memelihara system komunikasi(Barnard, dalam Face & Faules : 56 – 57)

Menurut Barnard (1982 : 197 – 199) seorang akan dan mau menerima suatu komunikasi sebagai wewenang hanya jika berlaku 4 syarat sekaligus: (a) ia dapat dan memang mengerti komunikasi itu (b) pada waktu dia mengambil keputusan, dia percaya bahwa komunikasi itu tidak bertentangan dengan tujuan organisasi; (c) pada waktu dia mengambil keputusan, dia percaya bahwa komunikasi itu sesuai dengan kepentingannya sebagai keseluruhan, dan (d) ia secara mental dan fisik mampu memenuhinya.

a. Suatu komunikasi yang tidak dimengerti tidak bisa mempunyai wewenang (mewujudkan wewenang), Misalnya, perintah yang diberikan dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh sipenerima, sama sekali bukan perintah- tak seorangpun menganggapnya demikian. Nah banyak perintah yang akan sangat sulit dimengerti. Sering perintah itu perlu dinyatakan dalam istilah yang umum, dan orang-orang yang memberikannya dalam banyak keadaan tidak dapat menerapkannya sendiri. Baru setelah ditafsirkan mereka mempunyai arti. Si penerima terpaksa mengabaikannya atau hanya berbuat sesuatu dengan harapan bahwa perbuatan itu adalah pemenuhan perintah.

Maka, sebagian besar kerja administrasi terdiri dari penafsiran dan penafsiran kembali perintah dalam penerapannya pada keadaan konkret , yang pada mulanya tidak atau tidak dapat diperhitungkan.

b. Suatu komunikasi yang menurut penerima tidak cocok dengan tujuan organisasi, seperti yang ia artikan, tidak dapat diterima. Tindakan tidak akan

dilakukan karena adanya maksud-maksud berlawanan. Contoh praktis yang paling biasa adalah berhubungan dengan pertentangan dalam perintah. Itu tidak jarang terjadi.

Seorang yang cerdas akan menolak wewenang perintah yang menentang tujuan usaha menurut pengertiannya. Dalam hal yang ekstrim, tidak sedikit orang yang benar-benar akan dilumpuhkan oleh perintah-perintah yang bertentangan. Mereka benar-benar tidak mematuhi – misalnya seorang petugas system perairan diperintahkan meledakan pompa air yang mutlak perlu, atau seorang prajurit disuruh menembak temanya sendiri. Saya kira semua eksekutif yang berpengalaman mengetahui bahwa, untuk memberikan perintah yang memang perlu tetapi bagi sipenerima bertentangan dengan tujuan utama, terutama seperti yang ditunjukkan dalam praktek diatas, biasanya perlu dan selalu lebih baik (jika dapat) dipraktikkan, penjelasan atau petunjuk mengapa yang kelihatannya merupakan pertentangan sebenarnya adalah suatu khayalan belaka. Kalau tidak, perintah-perintah itu besar kemungkinannya tidak akan dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak secara memadai.

- c. Jika komunikasi dianggap menyangkut beban yang menghancurkan masalah murni yang didapat dari hubungan dengan organisasi itu, tidak akan ada lagi perangsang murni bagi individu untuk memberikan sumbangan kepadanya. Perangsang murni merupakan satu-satunya sebab untuk menerima perintah apapun sebagai mempunyai wewenang. Maka jika perintah semacam itu diterima, ia tidak boleh dipatuhi (dielakan dalam kasus-kasus yang lebih umum) karena tidak sesuai dengan motif-motif pribadi yang merupakan dasar mutlak penerimaan perintah. Masalah pengunduran diri secara sukarela dari berbagai macam organisasi biasanya karena sebab itu saja. Pura-pura sakit dan penampilan yang tak terandalkan dengan sengaja digunakan sebagai cara yang lebih lazim.
- d. Jika seseorang tidak dapat memenuhi suatu perintah, jelas perintah itu tidak akan ditaati, atau lebih tepat diabaikan. Memerintahkan orang yang tidak dapat berenang agar menyeberangi sungai dengan berenang merupakan kasus yang cukup jelas. Hal yang lebih umum ialah memerintahkan seseorang agar melaksanakan hal-hal yang hanya sedikit diatas kemampuannya; tetapi biarpun sedikit tidak mungkin, masih berarti tidak mungkin.

Menurut Pace & Faules (2000: 57) seperangkat premis dan penjelasannya diatas terkenal sebagai teori

penerimaan kewenangan yang berasal dari tingkat atas organisasi sebenarnya kewenangan nominal. Kewenangan menjadi nyata apabila diterima. Namun, Barnard menunjukkan banyak pesan tidak dapat dianalisis, dinilai dan diterima, atau ditolak dengan sengaja.

Teori yang juga masih termasuk dalam perspektif transisional adalah teori system. Menurut teori ini (dalam Goldhaber 1993 :126) komunikasi adalah penciptaan dan pertukaran pesan. Sebuah pesan terdiri dari symbol-symbol dimana penerima menangkap makna pesan tersebut. lebih lanjut (hal :127) pesan dapat diklasifikasikan berdasarkan: (a) hubungan (*dyadic*, kelompok kecil, atau *public*) (b) Jaringan (*formal* atau *informal*), (c) Tujuan (*task, maintenance, human, innovative*), (d) Penerima (*internal* atau *eksternal*), (e) Bahasa (*verbal* atau *non verbal*) (f) Metode penyebaran (perangkat keras dan perangkat lunak). Ciri- ciri utama proses komunikasi (hal 128 – 138) (a) Bersifat transaksional (b) Berdasarkan aturan (c) Bersifat personal (d) Bersifat serial.

- a. Pada tahun 1960, David Berlo menandai awal era baru komunikasi dengan bukunya, *The Process of communication* (proses komunikasi). Buku ini memperkenalkan pemikiran bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang dinamis. Pemikiran terbaru para peneliti dan perumus teori komunikasi menekankan kembali apa yang Berlo namakan dengan 'proses dinamis' dan mendefinisikan komunikasi sebagai proses transaksional. Sebagaimana digunakan disini, awalan 'trans' 'menunjukkan 'saling' dan 'timbal balik'. 'Trans' lebih digunakan daripada 'inter', yang berarti 'antara,' untuk menekankan bahwa komunikasi adalah proses timbal balik dimana kedua belah pihak, pengirim dan penerima saling mempengaruhi satu sama lain ketika mereka mengirim dan menerima pesan.
- b. Manusia berinteraksi dengan saling bertukar pesan, dengan transaksi simbolis penuh arti yang menggunakan isyarat verbal dan non verbal. Semakin berulang perilaku komunikasi kita, yaitu semakin sering kita memberikan pengertian yang serupa terhadap symbol dan sepakat dengan yang lainnya tentang pengertian tersebut, maka akan semakin terpola juga perilaku kita yang menggambarkan pengertian-pengertian ini nantinya. Schall mendefinisikan peraturan komunikasi sebagai pemahaman tak terucap dan tak tertulis (*tacit*) tentang cara yang tepat untuk berinteraksi/berkomunikasi dengan oranglain melalui suatu situasi dan peran, peraturan ini merupakan pilihan bukan hukum atau ketentuan

dan mengizinkan para pelaku komunikasi untuk menginterpretasikan perilaku dalam cara yang serupa (untuk berbagi pengertian). Diantara peraturan-peraturan tersebut terdapat kesepakatan mengenai siapa yang berbicara terlebih dahulu, siapa yang boleh menyela, siapa yang boleh setuju atau tidak dan lain-lain. Merupakan hal yang penting bagi para karyawan untuk memiliki pemahaman yang jernih mengenai apa peraturan eksplisit/formal dan implisit/informal dari suatu organisasi untuk menghindari konflik.

- c. Tidak ada dua orang yang sama. Kita semua merupakan hasil dari keluarga dan kebudayaan yang berbeda. Kita semua memiliki susunan syaraf yang berbeda. Karena perbedaan lingkungan dan fisiologis tersebut, persepsi kita pun juga berbeda. Persepsi adalah proses menerima dan mengelola data sensor dari lingkungan. Bergantung pada kebutuhan, nilai, perasaan, penampilan fisik, dan pengalaman masalah tiap orang, kita merespon ataupun mengabaikan sepotong informasi.(1) *Kata dan arti*. Terlalu sering dalam suatu organisasi terdapat asumsi bahwa satu-satunya syarat komunikasi yang baik adalah memastikan bahwa seluruh pesan diungkapkan dalam bahasa yang jelas dan sederhana. Pandangan naif komunikasi ini mengasumsikan bahwa kata itu sendiri memiliki arti. Padahal tidak. Sejauh ini, kita telah menekankan bahwa manusia menentukan ukuran suatu kata dari cara mereka menggunakannya. Sehingga, karena arti kata paling bergantung pada konteks/hubungan, maka menjadi hal yang mudah untuk memberikan arti pada kata dan pesan. (2) *Perbedaan persepsi*. Seringkali masalah komunikasi dalam organisasi bukanlah disebabkan oleh kurangnya kejelasan atau tidak menggunakan kata yang tepat, namun terletak pada perbedaan persepsi orang yang berkomunikasi.
- d. Pace dan Boren menggambarkan kelemahan komunikasi ini secara metaforis; 'Pesan-pesan dalam reproduksi bersambung, seperti air disungai yang besar, berubah melalui pengurangan, penambahan, penyerapan, dan kombinasi sepanjang rute dari hulu hingga tujuan akhirnya', Temuan dari para peneliti lain mendukung metafora sungai sehingga Pace dan Boren(dalam Godhaber, 1993:138) pun menyimpulkan (1) Detail menjadi terabaikan (2) Detail, ketika dipertahankan, menjadi terangkat (3) Detail menjadi ditambahkan (4) Detail menjadi berubah (5) pernyataan yang sebelumnya berubah

cenderung menjadi pernyataan pasti pada reproduksi selanjutnya (6) Detail cenderung tergabung menjadi konsep tunggal (7) Detail peristiwa atau kejadian yang digambarkan biasanya berupa apa yang seseorang harapkan terjadi daripada apa sebenarnya terjadi. (8) Detail disesuaikan untuk menjadikan keseluruhan pesan terlihat masuk akal.(9) Kata-kata tertentu disesuaikan untuk merefleksikan gaya ekspresi bicara yang diterima dan digunakan oleh tingkatan sosial dan strata individu yang tergabung dalam rangkaian reproduksi pesan. Ketika mendiskusikan jaringan komunikasi organisasi formal dan informal, beberapa rintangan yang tercipta dari proses yang bersambung ini menjadi semakin nyata. Kita mengetahui bahwa karena sipat komunikasi yang personal dan transaksional, reproduksi pesan menjadi penuh dengan kesalahan pemahaman dan kesalahan persepsian.

Pada penelitiannya tentang komunikasi organisasi dan pembaharuan teknologi, Sandra E O'Connell(dalam Godhaber : 144) menyimpulkan enam hipotesis yang berhubungan dengan peran teknologi dan pengaruhnya pada komunikasi organisasi:

1. Kesempatan untuk kontak tatap muka akan berkurang, dan informasi dari isyarat-isyarat non verbal akan tereduksi.
2. Akan lebih banyak pesan informal dan penyingkatan jalur hirarki sebagai format baru yang diterima
3. Saluran berpengaruh dalam pengurangan nilai pesan yang menimbulkan ambiguitas
4. Teknologi baru mengurangi dimensi kepercayaan dalam komunikasi.
5. Komputer mengajarkan manusia berpikir linear dan tidak sabar dalam berkomunikasi dengan manusia

Teori berikut yang dianggap dapat menjelaskan tindakan 'salah ketik' adalah teori reduksi ekuivokalis. Teori ini didalam pengelompokan Pace & Faules dimaksudkan pada teori kontemporer ; sedangkan didalam pengelompokan Daniel Spiker Papa dimasukan pada perspektif teori metapora biologi.

Teori reduksi ekuivokalitas atau reduksi ketidakjelasan pada dasarnya(dalam Daniel, Spiker, Papa, 1997: 49) mirip dengan teori system, namun teori ini memasukan juga teori evolusi untuk menjelaskan bagaimana mengorganisir dan

berkomunikasi dalam organisasi. Teori ini berangkat dari studi komunikasi organisasi oleh Karl Weick yang menyebutkan mengorganisir dan aktivitas komunikasi secara langsung mengarah pada reduksi dari *ketidak jelasan* dalam informasi

Menurut Weick (1979)(dalam Pace & Faules, 2000:81) ada 3 tahap utama dalam proses pengorganisasian, yaitu (a) tahap pemeranan (enactment) (b) tahap seleksi (c) tahap retensi.

- a. secara sederhana berarti para anggota organisasi menciptakan ulang lingkungan mereka dengan menentukan dan merundingkan makna khusus bagi suatu peristiwa.
- b. Aturan-aturan dan siklus komunikasi yang digunakan untuk menentukan pengurangan yang sesuai dalam ketidakjelasan.
- c. memungkinkan organisasi menyimpan informasi mengenai cara organisasi itu memberi respon atas berbagai situasi. Strategi-strategi yang berhasil menjadi peraturan yang dapat diterapkan pada masa mendatang.

Konsep yang mendasari teori ini (dalam Daniel, Spiker, Papa, *ibid*: 50-51) adalah bahwa organisasi berada dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sesuai dengan hasil penelitian Weick diakhir abad ke 20 bahwa lingkungan dari organisasi sangat rumit dan terkadang terjadi turbulensi. Untuk memahami hubungan dari reduksi ketidakjelasan dan komunikasi organisasi, kita dapat membandingkan antara penanganan situasi rutin dengan situasi krisis. Pada situasi rutin, aturan-aturan dijalankan untuk menghadapi situasi yang memang sudah terprediksi sebelumnya. Karena unsur ketidakjelasan sedikit maka hanya dibutuhkan sedikit komunikasi. Namun demikian jika menghadapi situasi yang tidak terduga dan rumit serta penuh ketidakjelasan dibutuhkan komunikasi yang lebih mendalam.

Tiga proposisi dasar dari teori ini adalah: (1) Saat input dari lingkungan hanya memiliki sedikit ketidakjelasan, organisasi dapat bergantung pada aturan-aturan sebagai pegangan untuk respon, jika ketidakjelasan meningkat maka organisasi hanya dapat bergantung sedikit pada aturan-aturan. (2) Saat ketidakjelasan meningkat usaha komunikatif lebih diperlukan untuk meresponnya dan inilah yang disebut situasi krisis (3) Semua yang terjadi disebabkan karena ketidakjelasan menyebabkan aturan menjadi tidak terlalu berguna.

Konsep ekuivokalis ini menjelaskan bagaimana bisa terjadi distorsi pesan dalam komunikasi formal dari atas kebawah dalam sebuah organisasi. Semakin

tinggi ekuivokalis pesan maka sebaiknya menggunakan medium yang kaya. Dan sebaliknya semakin rendah ekuivokalis pesan sebaiknya medium yang miskin.

Trevino, Daft dan Lengel(1990)(dalam Pace & Faules, 2000: 188) berpendapat bahwa kekayaan setiap medium berdasarkan pada (1) Ketersediaan umpan balik seketika (2)Kemampuan untuk menyampaikan isyarat isyarat berganda – bahasa tubuh, nada suara dan lain-lain (3) Penggunaan bahasa alamiah untuk menyampaikan hal-hal yang pelik (4) Fokus pribadi yang memungkinkan disertakannya perasaan-perasaan dan emosi pribadi untuk menyesuaikan dengan lingkungan penerima. Menurut kriteria ini, tatap muka dipandang sebagai medium yang paling kaya, sedangkan laporan-laporan tergolong kedalam kategori miskin.

Masalah masalah yang dihadapi dalam komunikasi kebawah: (1) Ketidak cukupan informasi. Yaitu anggota tidak menerima informasi yang penting dan relevan dengan pekerjaan mereka (2) Metode penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh anggota organisasi (3) Penyaringan informasi sehingga informasi yang diterima oleh bawahan tidak lengkap.

Sementara itu Read (dalam Goldaber, 1993 : 221) mempelajari tingkat pemahaman atasan mengenai masalah pekerjaan yang dihadapi bawahannya sebagai pengukuran komunikasi keatas (*upward communication*) . Pemahaman tersebut diukur dalam hubungan kepercayaan dan pengaruh atasan melalui perspektif dan aspirasi bawahan. Hasilnya adalah tingkat keakuratan komunikasi keatas dalam kondisi terbaik jika mereka mempercayai atasannya, tetapi meningkatnya aspirasi bawahan dan tingginya pengaruh atasan berpengaruh negatif atas kepercayaan dan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang ambisius menyembunyikan masalah pekerjaan dari atasan, terutama jika atasannya mencurigai sesuatu dan berpengaruh terhadap kenaikan pangkat.

Athnassiades menemukan bahwa tingkat *distorsi* pesan keatas tergantung pada perasaan ketidaksamaan bawahan dan keinginannya mendapat promosi. Bawahan cenderung mengubah informasi ketika mereka menginginkan jabatan yang lebih tinggi. Penemuan ini membuktikan bahwa atasan gagal memahami persoalan yang dihadapi bawahan karena pegawai ambisius, curiga, dan cenderung menutupi masalah tertentu.

Krivonos menyimpulkan penemuan dari komunikasi keatas ,sebagai berikut :

1. Bawahan cenderung mengubah informasi yang diberikan keatasan agar menyenangkan atasannya.
2. Bawahan cenderung menyampaikan apa yang ingin atasannya ketahui
3. Bawahan cenderung menyampaikan apa yang mereka pikir ingin didengar atasannya
4. Bawahan cenderung memberikan informasi yang baik/ positif daripada memberikan Informasi yang kurang baik/ negatif kepada atasannya.

Metode Kajian

Tipe kajian ini adalah kasus, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi diperoleh data data skunder yang bersipat kualitatif. Data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif , dengan langkah langkah sebagai berikut ,

- Data disusun berdasarkan tema yang dibentuk dari rumusan masalah dan kerangka konsep/ teori
- Mencari makna dari data dan makna data yang lebih luas dengan menghubungkannya dengan konsep atau teori yang relevan
- Memberikan ulasan atas masing masing makna yang diperoleh serta memberikan ulasan yang lebih luas dengan mensintesis ulasan makna makna tersebut.
- Menyimpulkan makna dengan memfokuskannya; dalam kaitan menjawab rumusan permasalahan.

HASIL PENELITIAN

Hasil Kajian

Dengan mengkaji isi majalah Forum Keadilan nomor 24, tanggal 23 Oktober tahun 2011, pada halaman 11, 14,15 dan 23 maka dikumpulkan data kualitatif yang berkaitan dengan faktor faktor yang berkemungkinan menjadi penyebab terjadinya peristiwa “salah ketik” dalam penetapan Ketua KPU RI(Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) oleh Kepolisian Republik Indonesia’

Jimly Ashidiqie mantan Ketua Mahkamah Konstitusi misalnya memberikan pendapat , heboh itu merupakan cermin dari tidak profesionalnya kerja Polri. ‘Jelas ini cara kerja yang tidak professional, agak kumpang,’ kata Jimly seraya menambahkan bahwa pengakuan adanya’salah ketik’ sebagai bukti adanya tindakan yang tidak professional tersebut.(Majalah Forum Keadilan No 24, 23 Oktober 2011: hal 15)

Selain itu Amir Syamsudin mantan sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan seorang praktisi hukum

yang cukup dikenal, menilai penyebab timbulnya masalah tersebut karena overlappingnya kewenangan didalam menegakan hukum. Menurut Amir, bila masalahnya pada penetapan yang dilakukan KPU, maka persoalan itu sebenarnya sudah selesai dengan keluarnya keputusan Mahkamah konstitusi. Dimana MK pada saat itu menolak gugatan Syukur Mandar. Senada dengan hal itu Ketua KPU sedikit menjelaskan, kasus itu dua tahun lalu, dan selesai di MK. Tapi dibongkar lagi, dan mendapat ruang untuk dipersoalkan (kembali). Kalau hal ini diberi ruang, bisa jadi yang lain digugat(juga), seperti(hasil) Pemilu, pilkada,juga pilpres. Bila pihak yang kalah diMK bisa melapor ke Polisi. Padahal di Undang Undang jelas disebutkan upaya hukum terakhir dalam persengketaan Pemilu ada diMK.(Ibid: Hal 15 dan 23)

Sementara menurut Brigjend Pol Ketut Untung Yoga Ana juru bicara Mabes Polri , adanya kata tersangka harusnya tidak tercantum pada surat tersebut. Karena itu format yang sudah biasa digunakan (SOP Format Surat), dan tidak wajib mencantumkan tersangka. Meskinnya dibagian prihalnya ditulis sesuai dengan substansinya yaitu Ketua KPU sebagai pihak terlapor. (ibid : hal 14)

Ketidak laziman alasan yang digunakan untuk menganulir status tersangka Abdul Hafidz Anshary ini akhirnya banyak menimbulkan praduga. Apakah memang betul penganuliran itu karena adanya ke cerobohan “salah ketik” dalam penulisan status Abdul Hafidz Anshary dalam SPDP(Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebelum dikirimkan ke Kejaksaan agung melalui proses berjenjang yang cukup panjang di internal perwira tinggi Polri tidak menyadari istilah status saksi terlapor di SDPP sangat tidak lazim mengingat mereka sudah bertahun-tahun malang –melintang didunia penyidikan. Begitu juga terhadap perkaranya Abdul Hafidz Anshary dipercaya banyak kalangan akan membuka kotak Pandora kebobrokan pemilu legislatif 2009 lalu sebagaimana kasus Andi Nurpati yang sampai saat ini tak kunjung tuntas diusut Kepolisian. Akibatnya, Kepolisian terjepit diantara banyak kepentingan sehingga terpaksa membiarkan diri dipermalukan dihadapan publik(ibid: hal 11)

Pembahasan

Dengan keterangan resmi yang telah disampaikan Pihak Mabes Polri oleh Brigjend Pol Ketut Untung Yoga bahwa pihak penyidik Direktorat I Tindak pidana umum Bareskrim melakukan kecerobohan mencantumkan Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary sebagai tersangka dalam SPDP yang dikirimkan ke Kejaksaan Agung merupakan ‘salah ketik” maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai

Human error. (Majalah Forum Keadilan, No 24, 23 Oktober 2011, hal 14)

Maka tindakan'salah ketik ' ini dapat didekati dengan perspektif transisi/ metapora biologi.

Salahsatu diantara yang termasuk Perspektif diatas adalah teori reduksi ekuivokalis. Didasarkan pada teori ini, tindakan 'salah ketik' dimungkinkan karena 2 hal. Yang pertama karena ketidak jelasan pesan yang diterima para penyidik dan yang kedua penggunaan media yang miskin.

Sebelum para penyidik menerima pesan yang berkaitan dengan status Ketua KPU dan kawan-kawan, konten itu berada ditangan para perwira tinggi dan menengah polri yang menjadi atasan mereka. Ditangan mereka pesan tersebut diolah berdasarkan informasi yang disampaikan pengadu. Lewat rapat-rapat yang dilakukan diambil keputusan tertentu. Dan ini diteruskan kepada penyidik. Namun, para penyidik ini dimungkinkan hanya menerima perintah 'proses' dan selanjutnya penetapan status diserahkan kepada mereka. Tetapi ketika diteruskanya proses tersebut kepenyidik tidak diikuti dengan penyerahan semua data dan informasi, karena atasan mereka melakukan penyaringan. Boleh jadi hal inilah yang menyebabkan terjadinya tindakan'salah ketik'

Selain itu penyampaian pesan bisa juga melalui media yang tidak memungkinkan dilakukanya koreksi seketika atau diskusi, sehingga pesan ekuivokalis tetap tidak bisa dikurangi atau dihilangkan. Ketika masalah itu harus diproses dan segera didapatkan hasil, tak pelak lagi para penyidik akan memproduksi hasil dengan dasar yang sudah minim.

Bila tindakan 'salah ketik' ini dikaitkan dengan teori system, maka hal itu dapat dijelaskan melalui sipat komunikasi. Sebagaimana diketahui secara system proses komunikasi adalah suatu proses penciptaan dan pertukaran pesan. Didalam penciptaan dan pertukaran pesan ini aliran pesan dan informasi terus berjalan tanpa henti sebagaimana metafora yang telah digambarkan oleh Pace dan Boren ,sehingga pesan dan informasi itu mengalami pengurangan, penambahan, penyerapan atau kombinasinya. Akhirnya, pesan yang diterima penyidik mengalami perubahan dari aslinya. Maka didasarkan pada teori ini para penyidik bisa memperlakukan pesan dan informasi yang diterimanya dengan perilaku tertentu. Detail pesan bisa diabaikan, sehingga penyidik cenderung menyimpulkan secara umum. Atau bisa juga menyimpulkan berdasarkan detail tertentu karena disepakati oleh sebagian besar penyidik. Atau detail yang ada ditambahkan dengan data atau informasi lain yang didapatkan dari pihak yang dipercaya penyidik.

Atau detail- detail tersebut dirubah. Atau penyidik menggabungkan detail detail tersebut menjadi sebuah integritas. Penyidik menggunakan detail yang diharapkan sebelumnya untuk menjadi kenyataan. Atau penggunaan detail untuk mencerminkan pada penerima bahwa pengirimnya dari tingkatan sosial tertentu.

Berbeda dengan hal diatas, dapat juga 'salah ketik' itu terjadi bukan disebabkan oleh input dari atasan yang kurang memadai dan lalu para penyidik melakukan penyimpulan yang salah. Melainkan 'salah ketik' itu disebabkan oleh kesengajaan; dimana penyimpulan oleh penyidik memang sengaja dibuat tidak seuai dengan perintah atasan atau setidaknya tidaknya tidak berdasarkan perintah mereka. Kemudian penyimpulan itu diserahkan untuk ditanda tangani. Sebelum ditanda tangani atasan harus mengecek kembali apakah penyimpulan yang berupa surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) iitu sudah sesuai dengan perintah/ arahan atau tidak. Setelah itu baru dilakukan penanda tanganan surat dan selanjutnya dikirimkan kepihak kejaksanaan.

Jika skenario diatas yang telah terjadi, maka 'salah ketik' terjadi kemungkinan disalahsatu titik atau didua titik rawan. Pertama ketidak telitian pihak pemeriksa sebelum surat ditanda tangani. Kedua surat itu sejak semula sudah mengandung 'salah ketik'. Ketiga kemungkinan 'salah ketik' itu terjadi disebabkan faktor pertama dan kedua.

Jika tindakan yang terjadi berdasarkan skenario kedua dan ketiga maka bisa dikatakan pihak penyidik itu telah melakukan tindakan yang sangat berani. Karena itu adalah tindakan merubah pesan/ perintah/ arahan secara sengaja . Hal ini hampir- hampir tidak masuk di akal. Mengingat konsekwensinya tentu sangat berat ,apalagi pada institusi yang dikenal dengan system komando dan kedisiplinaya itu. Namun penelitian yang dilakukan oleh Athnassiades (dalam Goldaber, 1993 : 221) menemukan bahwa *distorsi* pesan atau informasi yang disengaja itu dapat benar benar terjadi. Tergantung kepada ketidaksamaan bawahan dan keinginanya mendapat promosi. Bawahan cenderung mengubah pesan/informasi ketika mereka menginginkan jabatan yang lebih tinggi. Karena itu bisa saja 'salah ketik' memang disengaja oleh bawahan. Jadi bukan bahan dari atasan yang 'cacat' melainkan penyimpulan dari proses yang sengaja disalahkan, agar atasanya melakukan kesalahan, dan dia mendapatkan keuntungan atau kesempatan.

Mengenai alasan diatas lebih ditegaskan lagi oleh temuan Krinovos (dalam Goldhaber,1993 :221) sebagai berikut: bawahan cenderung mengubah

informasi yang diberikan keatasan agar menyenangkannya. Atau ia ingin menyampaikan pesan apa yang ingin atasannya ketahui. Atau ingin menyampaikan pesan yang dia pikir ingin diketahui atasannya. Dan bawahan cenderung memberikan pesan/informasi yang baik/ positif daripada memberikan pesan/ informasi negatif kepada atasannya. Jadi motivasi tertentu terutama berkaitan dengan aspirasi mendapatkan pujian dan promosi dapat menyebabkan bawahan 'berani' mengubah penyimpulan dan menyampaikannya keatasan untuk disahkan sebagai keputusan pimpinan atau lembaganya.

Berbeda dengan hal diatas dengan memakai kacamata Chester I Barnard 'salah ketik' dapat dilihat sebagai kealfaan baik oleh pimpinan polri maupun penyidik. Karena Ketika atasan membuat sebuah pesan/informasi untuk bawahannya dia tidak menyadari bahwa perintah perintahnya banyak yang sukar untuk ditafsirkan. Bawahan dalam hal ini penyidik tidak dapat menanyakan lebih lanjut karena masalah birokrasi atau hambatan psikologis. Tetapi mereka dituntut untuk memproses pesan tersebut dalam bentuk sebuah produk dengan deadline waktu tertentu. Untuk memenuhi target bukan tidak mungkin banyak bawahan /penyidik yang menafsirkan pesan tersebut secara spekulatif dan berharap tindakan yang dilakukannya sesuai dengan isi pesan/ informasi dari atasannya. Menurut Barnard (1982:197-199) banyak perintah atasan yang sangat sulit dimengerti. Sering pernyataan itu perlu dinyatakan dalam istilah yang umum. Banyak pesan selain sulit ditafsirkan juga tidak dapat dianalisis, dinilai dan diterima. Padahal sebagian besar kerja administrasi terdiri dari penafsiran dan penafsiran kembali perintah dalam penerapannya yang konkret.

Dalam situasi komunikasi interpersonal/ dyadic terjadi komunikasi yang mempunyai sipat sipat tertentu. Seperti bersipat transaksional, lekat dengan aturan, personal/akrab, dan bersipat serial.

Dalam konteks kasus 'Salah ketik' oleh Mabes Polri juga dapat dijelaskan dengan konsep sipat komunikasi yang transaksional. Dalam komunikasi semacam ini terjadi komunikasi yang saling pengaruh mempengaruhi baik dari pesan yang disampaikan secara verbal maupun dari sikap atau perilaku non verbalnya. Disini tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan persepsi atau kesalahan pahaman terhadap pesan atau pihak lain.

Begitu juga komunikasi yang dyadic yang seringkali berulang akan menimbulkan pola pola perilaku tertentu yang tercipta secara sengaja atau tanpa disadari. 'Salah ketik' bisa saja terjadi karena

pihak penyidik menyimpulkan pesan atasan dikaitkan dengan pola pola komunikasi mereka selama ini.

Dan yang tidak dapat dihindari komunikasi dyadic yang harmonis akan menimbulkan keakraban. Dalam hal dapat mengaburkan batas antara atasan dan bawahan, antara perilaku formal kedinasan dengan perilaku pertemanan/ kehidupan sehari-hari. Disini juga bisa terjadi atau tercipta celah untuk terjadinya kasus 'salah ketik' tersebut.

Dengan kata lain dalam komunikasi dyadic kemungkinan terjadinya 'salah ketik' disebabkan oleh masalah psikologis berupa kesalahan persepsian dan atau kesalahan pahaman.

KESIMPULAN

'Salah ketik' sebagai alasan yang dikemukakan oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk penganuliran status tersangka Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menjadi saksi terlapor, tidak bisa diterima oleh sebagian warga masyarakat.

Tidak tanggung- tanggung mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidique menilai perubahan status yang mendadak dalam sehari – tanggal 10 oktober diungkapkan wakil jaksa agung sebagai tersangka besoknya tanggal 11 oktober 2010 diubah pihak kepolisian sebagai saksi terlapor - sebagai cermin dari ketidak profesionalan kerja Kepolisian. Bahkan lebih jauh dia menilai hal itu juga sebagai bukti bahwa kepolisian telah bertindak agak kumpang.

Sedangkan anggota komisi III DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menilai penganuliran keputusan terhadap Ketua dan anggota KPU itu diduga karena ada intervensi kekuasaan, karena kalau status itu diteruskan dan dilakukan penyidikan serta dibawa ke pengadilan, maka akan terjadi pengungkapan secara keseluruhan kejanggalan kejanggalan yang terjadi dari semua pemilu yang sudah diselenggarakan oleh Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary dan jajarannya.

Sementara itu Amir syamsuddin mantan Sekretaris Jenderal Partai demokrat dan pengacara yang cukup dikenal, menilai perubahan revolusioner status Ketua KPU itu sebagai pembetulan, karena sengketa pemilu berada didomain Mahkamah Konstitusi. Karena itu dengan dirubahnya status tersebut sengketa pemilu yang diadakan, keputusannya dikembalikan kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi ketika mengadili kasus itu dimasa lalu.

Tidak ketinggalan redaktur senior majalah Forum Keadilan Syamsul Mahmudin menilai bahwa penganuliran dan pengalihan status Ketua dan anggota KPU sebagai menimbulkan kecurigaan dan praduga. Menurutnya hal ini akan sangat beralasan jika dihubungkan dengan proses berjenjang diantaranya melalui kajian/pemeriksaan para perwira tinggi Polisi dulu baru SPDP bisa diterbitkan dan disampaikan ke Kejaksaan Agung. Dan sulit dipercaya, perwira perwira tinggi itu tidak menyadari kejanggalan SPDP sebelumnya.

Penilaian-penilaian diatas boleh saja diungkapkan, tetapi bila diteliti lebih dalam ternyata mengandung bias-bias. Dan ini tidak bisa dijadikan pegangan dalam sikap formal maupun hukum.

Secara legal formal, alasan penganuliran tersebut telah sah baik secara substantif maupun dari segi hukumnya. Karena pernyataan tentang 'salah ketik' sebagai sebab penganuliran telah dinyatakan oleh Pihak Kepolisian melalui pejabatnya yang berwenang, diungkapkan dan disaksikan oleh umum.

Bertitik tolak dari prinsip legal formal ini, maka alasan penganuliran tersebut karena 'salah ketik' layak dan aman untuk diterima.

Karena itu tindakan 'salah ketik' sangat dimungkinkan untuk dianalisa secara ilmiah, mengingat hal itu terjadi didalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang kelembagaan dan personalnya besar. Dan dampak dari tindakan tersebut telah berpengaruh terhadap Kredibilitas Pimpinan dan Lembaga Negara KPU yang kedudukannya setingkat menteri dan Departemen.

Setelah dilakukan kajian teoritis dengan menggunakan konsep distorsi pesan, didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan, salah ketik, tersebut. Sebagai berikut :

1. 'Salah ketik' dimungkinkan terjadi karena ketidakjelasan pesan, baik karena faktor pemilihan media yang miskin', maupun karena penyaringan pesan yang dilakukan pihak atasan penyidik sehingga terjadi distorsi pesan/informasi yang berdampak kepada tindakan salah ketik oleh penyidik.
2. Dalam system komunikasi dimana terjadi arus pesan/informasi yang bersipat serial, maka penyidik cenderung untuk menyimpulkan pesan yang diterima didasarkan pada detail detail yang diterimanya. Penyimpulan ini memungkinkan juga terjadinya tindakan 'salah ketik'
3. Bawahan yang tidak percaya kepada atasannya atau mempunyai motif untuk mendapatkan promosi,

dimungkinkan untuk dengan sengaja mengubah pesan atau arah pesan, dengan tujuan menyenangkan atasannya atau untuk mendapatkan kesempatan dari kesalahan atasannya. Dalam kaitan dengan tindakan 'salah ketik' ini dapat diwujudkan dengan melakukan kesalahan dalam pengetikan tersebut

4. Atasan dalam hal ini Perwira Tinggi Mabes Polri tidak menyadari pesan pesan yang disampaikan kepada para penyidik sangat mungkin tidak bisa ditafsirkan oleh para penyidik. Bahkan mungkin tidak dapat dianalisis, dinilai dan diterima. Untuk mengejar dead line yang sudah ditentukan, dia berusaha menafsirkan semampunya dengan harapan penafsiran itu sesuai dengan yang dimaksud oleh atasannya. Dan hasil spekulasi semacam ini dapat menyebabkan munculnya tindakan 'salah ketik'
5. Komunikasi yang bersipat transaksional dan personal, sangat memungkinkan terjadinya kesalahan persepsian dan kesalahpahaman terhadap pesan atasan, yang memungkinkan terjadinya tindakan 'salah ketik'

DAFTAR PUSTAKA

- Barnard, I. Chester. (1982) (Penterjemah: Ny Rochmulyati Hamzah) *Fungsi Eksekutif*, Jakarta, PT Pustaka Binaman Pressindo dan Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen
- Bogdan, Robert dan Biklen Kopp Sari, (1982). *Qualitative Research For Education An Introduction to Theory and Methods*. Boston London : Allyn and Bacon, Inc
- Daniels, Tom D, Spiker, Barry K. Papa, Michael J. (1997) *Perspectives on Organizational Communication*. 4th ed. Boston. McGraw-Hill
- Goldhaber, Gerald M. (1993) *Organizational Communication*. 6th ed. Boston, MA: McGraw-Hill Co
- Goldhaber, Gerald M dan George Barnett. (1995) *Handbook Of Organizational Communication* 2nd printing. Norwood, NJ: Ablex Publishing Co
- Jablin, Fredric M dan Linda Putnam (eds) (2001) *Handbook of Organizational Communication* 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc
- Pace, R. Wayne dan Don F. Faules (1994) *Organizational Communication*. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall

- Putnam, Linda dan Michael L. R. Pacanowsky (eds). (1983) *Organizational Communication: Interpretive Approach*. Beverly Hills, CA: Sage Publications Inc
- Pace, R. Wayne dan Don F. Faules (2000) (Peterjemah: Dedy Mulyana), *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Cetakan kedua, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- McPhee, Robert D. dan Philip K. Tompkins (eds). (1985) *Organizational Communication: Traditional Themes and New Directions*, Beverly Hills, CA: Sage Publications Inc.
- Majalah *Forum Keadilan* nomor 24 tanggal 23 Oktober 2011
- <http://news.okezone.com> juli 2010 (diakses: oktober 2011)